

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku atau Sumber Lainnya

- Ginting,S, R. P. (2021). Tinjauan Atas Perubahan Sanksi Bunga SKPKB Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pelaksanaan Penerbitan Dan Tingkat Pelunasan SKPKB Di KPP Pratama Batam Selatan. *Karya Tulis Tugas Akhir*. Tangerang Selatan.
- Gusman, H. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi. <http://repository.uib.ac.id/490/>
- Hermawati, V. (2019). Pelaksanaan Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) Pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung. <https://repository.bsi.ac.id/index.php/repo/viewitem/22728>
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Jurnal Pajak dan Akuntansi 1(1)*, 125-135.
- Kamilia, I. N. (2021). Tinjauan Atas Pelaksanaan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pasca Pemberlakuan Undang Undang Cipta Kerja Di KPP Pratama Tasikmalaya. *Karya Tulis Tugas Akhir*. Tangerang Selatan.
- Maros F., Elitear, J., Tambunan, A., & Koto, E. (2016). *Penelitian Lapangan (Field Research)*. https://www.academia.edu/24308046/PENELITIAN_LAPANGAN_FIELD_RESEARCH_PADA_METODE_KUALITATIF
- Muhadjir, N. (1996). Metodologi penelitian kualitatif. Rake Sarasin. <https://id.scribd.com/document/374727552/02-Noeng-Muhadjir-Metodologi-Penelitian-Kualitatif>
- Panjaitan, J. V. (2021). Tinjauan Kepatuhan Pelunasan SKPKB Dan STP Pasca Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja Di KPP Pratama Medan Polonia. Tangerang Selatan. *Karya Tulis Tugas Akhir*. Tangerang Selatan.
- Sembiring, L. Y. (5 November 2021). Ternyata Cuma Segini Orang RI Patuhi Pajak, Kamu Termasuk? CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211105080424-4-289174/ternyata-cuma-segini-orang-ri-patuhi-pajak-kamu-termasuk>
- Setiawan, D. A. (01 Desember 2020). *Faktor Ini Bikin Sanksi Administrasi Pajak Dorong Kepatuhan Sukarela*. <https://news.ddtc.co.id/faktor-ini-bikin-sanksi-administrasi-pajak-dorong-kepatuhan-sukarela-25990>

- Siamena, E., Sabijono H., & Warongan, J.D. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 920.
- Tanjung, S., & Ely, T. (2013). Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak, Persepsi Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Merupakan Klien dari Kantor Konsultan Pajak X. *Jurnal Pajak dan Akuntansi* 1(1), 146-151.
- Zulvia, S. (2011). *Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

2. Dokumen Publik atau Peraturan Perundang-Undangan

- Pemerintah Indonesia. (1983). Undang-Undang .Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Pemerintah Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Pemerintah Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Kementrian Keuangan. (2007). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak
- Kementrian Keuangan. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
- Kementrian Keuangan. (2000). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Kementrian Keuangan. (2020). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.010/2020 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga
- Kementrian Keuangan. (2020). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.10/2020 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
- Kementrian Keuangan . (2021). *Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Penguatan Reformasi.*

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHiLGmnNv0AhWO63MBHVasA7UQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.kemenkeu.go.id%2Fmedia%2F16835%2Finformasi-apbn2021.pdf&usg=AOvVaw2J2wCUH_QdagxK547r0hia

Kementrian Keuangan . (2021). *KMK Tarif Bunga – Badan Kebijakan Fiskal*.
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kmk-tarif-bunga>